BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan abadi, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit perceraian dimaksud bertujuan agar perkawinan tersebut berlangsung kekal dan agar suami istri beserta anak-anaknya dapat hidup bahagia dan hal ini juga telah sesuai dengan ajaran Islam yang pada intinya menyatakan bahwa perkara halal yang dimurkai Allah adalah cerai.¹

Tidak dapat dipungkiri dalam sebuah perkawinan pasti terdapat perselisihan ataupun masalah. Permasalahan dalam rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian. Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut "*furqah*", yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.²

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur bahwa perceraian harus dilaksanakan di sidang pengadilan

¹ M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 8.

² Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.), hlm.16

dengan sebab atau alasan yang cukup bahwa antara suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami Istri. Keharusan menyelesaikan perceraian di Pengadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perceraian yang tidak didasari alasan yang sah serta dilakukan secara tergesa-gesa.

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan pernikahan, namun juga berakibat pada aspek hukum lainnya, terutama terkait harta bersama. Harta bersama dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa memandang siapa yang secara langsung menghasilkan atau mendapatkan kekayaan tersebut.

Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut hareuta seuhareukat, di Minangkabau disebut harta suarang, di daerah Sunda disebut guna kaya atau tumpang kaya, di Madura disebut ghuna ghana dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.³

Definisi Harta Bersama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 35 adalah Harta yang diperoleh selama perkawinan. Dipertegas lagi menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf f menyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet.1, Hlm.20

Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan, Subekti menjelaskan bahwa KUH Perdata menganut asas "persatuan bulat" harta perkawinan (*algehele gemeenschap*).⁴

“Asas persatuan bulat harta perkawinan bermakna bahwa setiap harta yang dihasilkan dalam perkawinan baik oleh suami, istri, atau suami dan istri menjadi harta bersama di antara mereka. Hal ini berakibat perolehan atau penghasilan yang kemudian digunakan membeli harta-harta demi hukum menjadi harta bersama dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa barang atau harta tersebut. Keadaan ini hanya dapat dikecualikan melalui suatu perjanjian perkawinan.”⁵

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian maupun kematian. Ketika suatu perkawinan berakhir, harta yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Oleh karena itu, bagi umat Islam, selain hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi acuan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan.

Pembagian terhadap harta bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Proses pembagian ini seringkali sering kali menjadi sumber perselisihan. Oleh karena itu, pengaturan pembagiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu diperlukan adanya

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Kencana : 2022), hlm. 39

⁵ *Ibid*, hlm. 40

kesepakatan bersama atau bahkan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi yang adil dan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Apabila tidak terjadi kesepakatan dan salah satu pihak yang menguasai harta tersebut enggan untuk membagi, maka gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan dan didaftarkan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Berkaitan dengan pengajuan gugatan pembagian harta bersama bagi pasangan beragama muslim mengikuti ketentuan dari Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami Istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke pengadilan agama”.

“Pengadilan Agama merupakan lembaga di Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus terkait hukum perdata Islam, terutama hukum keluarga Islam, termasuk pembagian harta bersama. Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian, kasus pembagian harta bersama pun turut bertambah. Data menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah perkara perceraian terus mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.”⁶

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai.⁷

⁶ Erfinah Zahriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), hlm. 6.

⁷ Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>

Dalam konteks harta bersama kemaslahatan merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama.⁸ Kemaslahatan dalam pandangan Islam bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*maqashid syariah*), yaitu keselamatan keyakinan agama (*hifzh ad-din*), keselamatan jiwa (*hifzh an-nafs*), keselamatan akal (*hifzh al-aql*), keselamatan keturunan (*hifzh an-nasl*), dan keselamatan harta (*hifzh al-maal*).

Hukum Islam memandang kemaslahatan sebagai cara untuk menghindari kemudharatan, seperti ketidakadilan atau kerugian ekonomi yang bisa menimpa salah satu pihak. Pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip ini agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada semua pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak, dengan tetap menjaga keadilan dan keseimbangan.

Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian tidak mendapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering kita ketemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, untuk itu patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya.⁹

Dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan “Duda atau janda berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

“Pendapat Mohd. Idris Ramulyo sepakat dengan aturan tersebut, bahwa dalam hukum Islam, apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik

⁸ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

⁹ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Zahir Publishing), hlm.208

karena cerai atau talak atas permohonan suami, atau atas gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri, menurut perimbangan yang sama.”¹⁰

Walaupun secara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas bahwa pembagian harta bersama idealnya dilakukan secara setara, yakni masing-masing pasangan berhak atas seperdua bagian, namun dalam praktik peradilan, seringkali ditemukan putusan yang berbeda. Adakalanya hakim memutuskan sesuai dengan ketentuan KHI, namun tidak jarang pula ditemui putusan yang memberikan porsi lebih besar kepada istri, misalnya dua pertiga bagian, sementara suami hanya memperoleh sepertiga bagian. Putusan yang demikian terlihat kontradiksi dengan aturan yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama, dimana seharusnya masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu seperdua.

Pertimbangan semacam ini biasanya dilakukan ketika hakim menilai bahwa pembagian secara setara tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama jika istri telah memberikan kontribusi yang lebih besar baik secara ekonomi maupun non-ekonomi selama pernikahan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kebutuhan pihak istri setelah perceraian, terutama jika ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengasuh anak atau berada dalam kondisi finansial yang kurang menguntungkan dibandingkan suami. Dengan pertimbangan ini, hakim berupaya agar pembagian harta bersama tidak hanya sesuai dengan aturan normatif, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih adil bagi pihak yang dinilai lebih membutuhkan dalam kehidupan setelah perceraian.

¹⁰ Muhamad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 428

Sebagai contoh putusan pembagian harta bersama dengan memberi porsi lebih besar terhadap salah satu pihak di lingkungan peradilan agama dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta bersama menjadi bagian milik Penggugat (Mantan suami) Dan 2/3 (dua pertiga) bagian milik Tergugat (Mantan istri). Adapun pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim memutuskan hal tersebut adalah ditemukannya fakta bahwa selama masa pernikahan, Tergugat berperan sebagai tulang punggung ekonomi dalam keluarga. Selain itu pihak suami (Penggugat) tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta tidak menjalankan fungsinya secara semestinya sebagai kepala keluarga yakni tidak menafkahi tergugat.

Selain putusan diatas, penulis juga menemukan kasus yang sama yakni pada Putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tentang putusan harta bersama pada Pengadilan Tingkat Tinggi. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan bagian Penggugat /Terbanding (mantan istri) mendapat bagian 1/4 dari harta bersama dan Tergugat/Pembanding (Mantan Suami) mendapat 3/4 bagian dari harta bersama. Majelis Hakim mempertimbangan bahwa telah ditemukan fakta sejak tahun 2006 Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik, keluar dari rumah meninggalkan Pembanding dan dua orang anaknya, sementara dua orang anaknya tetap berada dalam asuhan Pembanding

Berdasarkan kedua contoh putusan di atas, penulis menemukan putusan lain yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb. Putusan tersebut merupakan putusan mengenai pembagian harta bersama terhadap mantan pasangan suami istri yang telah bercerai

pada 09 September 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 44/Pdt.G/2008/PA.Jmb.

Pada perkara tersebut Penggugat (Mantan suami) mengajukan gugatan terkait pembagian harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ke Pengadilan Agama Jambi. Dalam salah satu petitum gugatannya Penggugat (Mantan Suami) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut.

Namun setelah mempelajari dan mempertimbangan bukti serta keterangan saksi dari masing-masing pihak, pada akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan pada perkara tersebut dengan salah satu amar nya adalah menetapkan bagian Penggugat Kompensi berhak mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta Bersama dan Tergugat Kompensi berhak mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta Bersama.

Berdasarkan amar putusan di atas maka dapat dilihat bahwa majelis hakim lebih memilih menyimpangi aturan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terkait besaran harta bersama yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena tidak hanya mencerminkan sikap progresif hakim dalam mengambil langkah, tetapi juga menimbulkan pembahasan hukum terkait bagaimana asas keadilan dapat berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum. Serta bagaimana hakim dapat menggunakan pertimbangannya untuk mencapai sebuah solusi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan praktis para pihak, khususnya dalam pembagian harta bersama.

Pendekatan ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum bisa lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh individu setelah perceraian, tanpa mengabaikan aspek keadilan yang substansial. Dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memilih judul skripsi **Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 563/Pdt.G/2023/Pa. Jmb)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/ PA. Jmb?
2. Apakah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb telah sesuai dengan prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka perumusan penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/ PA. Jmb.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb telah sesuai dengan prinsip keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait teori hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum keluarga. Dengan mempelajari serta menganalisis secara mendalam terkait pembagian harta bersama dalam kasus konkret. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita, tentang penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum oleh hakim dalam perkara pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur mengenai praktik pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, serta memberikan perspektif baru dalam memahami perlindungan hukum terhadap mantan pasangan, dan menjadi referensi teoritis dalam menilai kesesuaian putusan-putusan terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi pasangan yang mengalami perceraian, bahwa masing-masing pihak memiliki hak terkait harta Bersama. Serta diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman terkait prosedur dan ketentuan pembagian harta bersama di Pengadilan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif dengan topik penelitian yang sama.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dan tujuan dari judul skripsi ini serta untuk mencegah kesalahan interpretasi, penulis merasa penting untuk menjelaskan beberapa konsep yang tercantum dalam judul skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

1. Putusan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 60 mendefinisikan Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan merupakan produk akhir dari suatu proses peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan dan hibah yang maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹²

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 4 (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 200.

Selanjutnya harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan lain perkataan bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.¹³

3. Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah terjalannya ikatan perkawinan, dari ikatan tersebut akan terbentuk sebuah keluarga. Kehidupan dalam perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk berperan positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.¹⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan

¹³ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (*The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code*)," *Jurnal Penelitian Hukum* P-ISSN 1410 (2017). hlm. 447, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>

¹⁴ Fakhriyah Annisa Afroo, Nenan Julir, and Rema Syelvita, "Attending Walimatul 'Ursy: Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law," *Jurnal Kawakib* 5, no. 1 (2024): 35–42. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v5i1.222>.

ibadah serta, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵

Menurut Soemiyati, perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Swt.¹⁶

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri¹⁷.

Menurut pendapat Hurlock perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya.¹⁸ Pendapat lain dari Sudarsono mendefinisikan bahwa perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.¹⁹

¹⁵ Joko Lelono dan Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb)," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 312–31. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.9095>

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8

¹⁷ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.219.

¹⁸ Hurlock dan Elizabeth B , *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 54

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 163.

Berdasarkan penjelasan di atas, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan secara hukum akibat tidak harmonisnya hubungan dalam pernikahan. Situasi ini umumnya diawali oleh konflik antara suami dan istri yang kemudian memicu berbagai perubahan, baik dari segi emosi, psikologi, lingkungan, maupun dinamika keluarga, serta dapat meninggalkan dampak perasaan yang mendalam.

F. Landasan Teoritis

Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teori Keadilan

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepada para hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.

Mewujudkan keadilan menurut pandangan deontologikalisme tidak saja dalam proses peradilan yang penekanannya pada cara, prosedur, mekanisme (hukum acara), tetapi harus juga sampai pada putusan akhir.²⁰

Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama.²¹ Konsep Adil tidak selalu berarti membagi sesuatu menjadi dua bagian yang persis sama. Prinsip berlaku adil dalam pembagian harta bersama harus proporsional.

²⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 110

²¹ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan kedua puluh empat, 1990, hlm. 12.

Proporsional secara umum adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya atau porsinya. Dalam konteks pembagian harta bersama, adil berarti memberikan bagian yang sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, dan kondisi masing-masing pihak.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²² Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Kata "adil" yang menjadi akar kata dari keadilan mengisyaratkan bahwa keadilan adalah suatu kondisi dimana semua pihak diperlakukan secara sama tanpa adanya keberpihakan atau tindakan sewenang-wenang.

Salah satu teori keadilan yang berpengaruh di era modern adalah teori John Rawls. John Rawls mengembangkan suatu konsep keadilan yang fokus pada distribusi hak dan kewajiban secara *fair* sebagai parameter dasar adil tidaknya suatu tindakan atau perbuatan. Konsep ini disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran atau keadilan sebagai kesetaraan).²³

Konsep keadilan John Rawls tidak menuntut agar setiap individu terlibat dan menempuh prosedur yang sama, demikian pula setiap individu tidak harus mendapatkan hasil yang sama. Perbedaan hasil diterima sebagai sebuah keadilan yang berdasarkan pada kewajaran hasil yang seharusnya diterima. Penekanan teori

²² <https://kbbi.web.id/adil> (diakses pada 15 September 2024)

²³ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan (Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim)* (Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 58).

Rawls pada akhirnya mengarah pada pendistribusian hak dan kewajiban secara *fair* atau wajar.²⁴

Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyhur) dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan menjadi 2 yaitu :

- a. Keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.
- b. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*) adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing- masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar. Paling penting dari pandangan Aristoteles ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.²⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.²⁶

Kepastian Hukum mencakup beberapa elemen penting, seperti keteraturan dan konsistensi aturan hukum, dimana norma-norma hukum harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.

Kepastian Hukum adalah asas bahwa hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada hukum, agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif, kepastian hukum adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti

²⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, "Keadilan sebagai Keadilan (*Justice As Fairness*)", Pro Justitia, Vol.28, No.2, Oktober 2010, hlm. 238. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1064>

²⁵ Faisal, Emil El., dan Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2018), hlm. 21

²⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024), hlm. 116

sehingga dapat mencegah terjadinya multitafsir, serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁸ Hal ini berarti bahwa sistem hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai aturan-aturan yang berlaku serta menjamin bahwa keputusan hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Kepastian hukum juga mencakup perlunya adanya kejelasan dalam penegakan hukum, sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas serta merasa aman bahwa hak-haknya akan dilindungi dan ditegakkan oleh lembaga hukum.

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Bahwa hukum positif dan tidak boleh diubah²⁹

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum diatas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pada hukum positif menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai landasan utama dalam pembentukan dan penerapan aturan hukum. Kepastian hukum juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil dan

²⁷ Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–2039.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm. 71.

²⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm.558 , <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

konsisten, serta memberikan perlindungan bagi pencari keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tatanan hukum yang baik dan berkeadilan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan.³⁰

Jeremy Bentham dalam teori utilitarianismenya mendefinisikan kemanfaatan dengan istilah "*the greatest happiness of the greatest numbers*". Secara sederhana dapat dipahami dengan pengertian memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan/kenikmatan/kesenangan/kepuasan kepada sebanyak mungkin manusia.³¹

Penerapan asas kepastian hukum memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi dari putusan tersebut. Dengan mengintegrasikan asas kemanfaatan, hukum berusaha untuk mencapai kebaikan bersama, mendorong solusi yang serasi dan menguntungkan masyarakat secara luas, sehingga memperkuat prinsip keadilan dan kebenaran dalam praktik hukum.³²

³⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 110-111.

³¹ Asdar Nor, *Asas-Asas Hukum Kontemporer* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2023), hlm.68

³² Ujuh Juhana Asep Dedi Suwasta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Tohar Media, 2024), hlm.31.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu :

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis Karya Tulis	Jurnal
	Nama Penulis	Nasrullah
	Judul	Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Akibat Perselingkuhan
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak harus selalu sama rata antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari aspek pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab, adanya peran ganda, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, boros dan melakukan suatu kesalahan penyebab utama perceraian. Pelaku utama penyebab perceraian karena perselingkuhan bisa saja menjadi pertimbangan sebagai satu kesalahan

		yang berakibat 1/10 bagiannya dialihkan kepada suami/Istri yang menjadi korban perselingkuhan sebagai bentuk sanksi. Sehingga menghasilkan perbandingan 6/10 : 4/10.
	Perbandingan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama. Penelitian Nasrullah mengkaji dampak perselingkuhan dalam perceraian terhadap pembagian harta, yang menyebabkan istri menerima bagian lebih besar. Sementara itu, penelitian saya lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan porsi harta yang lebih besar bagi istri, dengan alasan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada keenam anaknya pasca perceraian

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
2	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Fahreza Saleh Siregar
	Judul	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/Pa.Mdn)

	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara nomor No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn menetapkan bagian harta bersama mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana masing-masing pihak berhak memperoleh bagian seperdua atas harta bersama. Kendala Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn, salah satu pihak dari Penggugat atau Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan itikad baiknya. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu pihak merasa tidak senang atau tidak rela atau mungkin dengan sengaja memperlama proses pembagian harta bersama tersebut sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi terhadap objek perkara gugatan harta bersama berupa tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat agar masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sah dan mutlak.</p>

	Perbandingan	<p>Pada skripsi karya Fahreza Saleh Siregar diatas berfokus membahas kendala Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan upaya hukum yang diambil apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan . Sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan bagian harta Bersama pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb</p>
--	--------------	---

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
3	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Cindy
	Judul	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dengan Akta Perdamaian Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan: 790/Pdt.G/2023/Pa. Btl).
	Tahun	2024
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait dengan pelaksanaan pembagian harta bersama secara damai pada Pengadilan Agama Bantul dengan perkara nomor 790/Pdt.G/2023/Pa.Btl.

		<p>Adapun alasan para pihak dalam pembagian harta bersama sepakat melakukan perdamaian yakni untuk mencapai keharmonian, mempermudah proses pembagian harta, dan mengurangi konflik yang mungkin muncul dan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dikatakan cukup mudah dengan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan kekuatan akta perdamaian ini mengikat, pembuktian dan eksekutorial.</p>
	<p>Perbandingan</p>	<p>Pada skripsi Cindy diatas terdapat kesamaan objek dengan yang penulis teliti yakni Putusan Pengadilan Agama terkait pembagian harta Bersama. Namun skripsi karya Cindy lebih berfokus kepada analisis pertimbangan para pihak yang memilih sepakat melakukan perdamaian dalam membagi harta bersama. Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada analisis putusan Pengadilan Agama Jambi yang sudah <i>inkracht</i> terkait pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam</p>

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, atau informasi sekunder, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Oleh karena itu, sumber yang dikaji pada penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber tertulis atau informasi sekunder.³³

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁵ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *statute approach* akan difokuskan pada analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang

³³ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 7

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm 86-88

³⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. 2023, hlm.133

mengatur mengenai perkawinan, harta bersama, dan khususnya pada prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁶

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁷ Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum bertujuan untuk menggali makna-makna baru yang terdapat dalam aturan hukum yang diteliti, atau bahkan untuk menguji kesesuaian suatu istilah antara teori dan praktik.

³⁶ *Ibid*, hlm. 138

³⁷ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (CV Cendekia Press, 2023), hlm.99

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Sumber-sumber tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/Pa.Jmb
- 4) Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr
- 5) Putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber yang memberikan penjelasan, analisis, yang membantu memperdalam pemahaman dan memberikan konteks tambahan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, artikel hukum, pendapat ahli hukum/doktrin, Seminar dan Lokakarya, Publikasi Lembaga Hukum berupa laporan, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga hukum, organisasi profesi, atau badan pemerintah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi ensiklopedia

hukum yang menjelaskan istilah dan konsep hukum, kamus hukum yang mendefinisikan istilah khusus dan berita pada media online.

4. Analisa Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Proses analisis ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami norma dan prinsip yang berlaku dengan menggunakan metode pendekatan yang telah penulis jabarkan diatas. Pada tahap ini penulis akan menganalisis terkait pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb dan membandingkan dengan pertimbangan hakim pada putusan lain yang memiliki isu hukum yang sama yakni putusan nomor Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr dan Putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan Pustaka tentang Perceraian, dan Konsep Harta Bersama Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb dan kemudian akan penulis bandingkan dengan pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr dan Putusan 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg Selain itu penulis akan menganalisis apakah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Jmb telah memenuhi prinsip keadilan.

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah dikaji dalam penelitian ini, serta penulis akan memberikan saran terkait topik yang telah dibahas.